

## MOTIVASI CALEG PEREMPUAN DITINJAU DARI ASAL PARTAI POLITIK

**Siti Hajar Sri Hidayati, Risana Rachmatan, Eka Dian Aprilia**  
Program Studi Psikologi Universitas Syiah Kuala

**Abstrak :** Kesetaraan gender merupakan hal yang paling penting untuk mencegah diskriminasi yang terjadi di masyarakat. Terdapat beberapa cara untuk mencapai kesetaraan gender, salah satunya dengan memberikan kesempatan pada perempuan untuk mempengaruhi kebijakan politik seperti berpartisipasi dalam politik dengan menjadi calon legislatif. Persentase perempuan yang rendah di lembaga legislatif, khususnya legislatif di Aceh menunjukkan bahwa perempuan masih belum berpartisipasi aktif. faktor penyebab minimnya persentase perempuan adalah motivasi yang rendah. Motivasi merupakan pendorong tingkah laku individu sesuai arah tujuan. Ada tiga jenis *need* yang mempengaruhi tingkah laku individu yaitu *need for power*, *need for affiliation* dan *need for achievement*. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan motivasi calon legislatif perempuan ditinjau dari partai nasional dan partai lokal. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 69 calon legislatif, yang terdiri dari 35 caleg partai lokal dan 34 caleg partai nasional. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan skala motivasi yang terdiri dari 24 pernyataan. Hasil analisis data menggunakan uji statistik *independent samples t-test* menunjukkan nilai  $P = 0,023$  ( $0,023 < 0,05$ ). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan motivasi pada caleg perempuan partai nasional dengan caleg perempuan partai lokal.

**Kata Kunci :** Motivasi, Calon Legislatif Perempuan, Partai Nasional, Partai Lokal

**Abstract :** Gender equality is the most important thing to prevent discrimination occurring in the community. There are several ways to achieve gender equality, one of them by providing the opportunity for women to influence political policy as to participate in politics by becoming candidates. The low percentage of women in the legislature, particularly the legislature in Aceh shows that women still do not participate actively. factors that cause minimal percentage of women is low

*motivation. Motivation is the driving behavior of individuals in the direction of interest. There are three types of need that influence individual behavior is need for power, need for affiliation and need for achievement. Based on this background, this study aims to look at the differences in motivation of women candidates in terms of national parties and local parties. This study uses a quantitative method with purposive sampling technique. The sample in this study amounted to 69 candidates, which consists of 35 local party candidates and 34 candidates of national parties. The data collection is done by using the motivational scale consists of 24 statements. The results of data analysis using statistical test of independent samples t-test showed  $P = 0.023$  ( $0.023 < 0.05$ ). Based on this we can conclude that there are differences in the motivation of female candidates female candidates of national parties with local parties.*

**Keywords:** *Motivation, Candidate Legislative Women, National Party, the Local Party*

## PENDAHULUAN

Kesetaraan gender merupakan dimensi penting dari usaha *United Nations Development Programme* (UNDP) untuk mengurangi separuh kemiskinan dunia pada tahun 2015 (Sari, 2009). Kesetaraan gender juga mampu mencegah diskriminasi terhadap perempuan yang selama ini terjadi di masyarakat, seperti diskriminasi dihadapan hukum, misalnya kasus perceraian, kasus pemerkosaan dan sebagainya (Koeswara, 2009). Terdapat beberapa cara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, diantaranya, dengan membangun mekanisme baru yang memungkinkan perempuan dapat mempengaruhi secara langsung kebijakan ekonomi dan politik (Sari, 2009).

Untuk dapat mempengaruhi kebijakan politik secara langsung adalah dengan berpartisipasi dalam politik. Partisipasi dalam politik dapat dilakukan dengan cara seperti menjadi anggota suatu partai baik itu partai nasional maupun lokal dan mencalonkan diri menjadi anggota parlemen (Koeswara, 2009).

Penerapan asas demokrasi di Indonesia telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam bidang pembangunan tanpa adanya diskriminasi terhadap suku, ras, agama, dan gender. Hal ini dikuatkan dengan adanya Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 yang menetapkan pijakan politis dan membuka peluang bagi perempuan Indonesia untuk berpartisipasi aktif di dalam pembangunan termasuk pembangunan politik yang

berwawasan gender (Rosidawati, 2012). Akses perempuan untuk masuk ke bidang politik semakin besar karena didukung oleh UU no. 10 tahun 2008 (Pambundi, 2007).

Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah masih belum meningkatkan persentase perempuan di dalam bidang politik. Masyarakat Indonesia masih menjadikan perempuan sebagai pilihan kedua untuk menduduki jabatan politik. Hal ini terlihat dari data yang ada dalam sejarah politik Indonesia sejak pemilihan pertama tahun 1955. Pemilihan umum pertama tahun 1955 merupakan pemilu dengan jumlah persentase perempuan dalam caleg yang paling rendah yaitu sebesar 3,8%, sementara angka tertinggi ada pada periode 1987-1992 yaitu 13%. Angka ini jelas belum bisa mewakili perempuan agar dapat bergerak lebih leluasa sehingga mampu memperjuangkan aspirasi kaum perempuan secara keseluruhan (Pambundi, 2007).

Minimnya jumlah persentase perempuan yang ada di politik, khususnya di legislatif disebabkan oleh banyak faktor, seperti agama, budaya, minimnya pengetahuan politik dan rendahnya kepercayaan diri (Idris, 2010). Faktor lainnya yang menyebabkan minimnya persentase perempuan di legislatif karena para wanita tersebut kurang memiliki motivasi dan dukungan dari keluarga (Koeswara, 2009).

Hal yang sama juga terjadi di Provinsi Aceh, dari hasil pemilu 2009-2014 jumlah keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) hanya 4 orang saja (Ismail, 2009). Siregar (2012) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa minimnya persentase perempuan Aceh di DPRA juga disebabkan oleh motivasi yang rendah dan konflik antara RI-GAM yang berkepanjangan. Provinsi Aceh tidak hanya memiliki Partai Nasional saja tetapi juga Partai Lokal yang merupakan hasil dari perjanjian damai di Helsinki (Asriati, 2009).

Persentase perempuan di DPRA dapat ditingkatkan dengan cara berpartisipasi dalam partai politik dan atau meningkatkan motivasi perempuan untuk terlibat dalam politik, misalnya dengan menjadi calon legislatif (caleg). Motivasi perempuan untuk berpartisipasi dalam partai dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti visi dan misi partai, ideologi partai dan bentuk partai. Menurut Idris (2010) beberapa caleg laki-laki berpartisipasi dalam politik disebabkan oleh keinginan mereka untuk terlihat lebih unggul di mata masyarakat, keinginan untuk memegang peranan penting dalam pemerintah dan merasa bahwa laki-laki adalah pemimpin dari perempuan sehingga untuk menjadi pemimpin itu dapat

diwujudkan dengan terlibat dalam politik. Hal ini tentu berbeda dengan alasan caleg perempuan terlibat dalam politik, seperti yang diungkapkan oleh Wahidah (2009) dalam penelitiannya bahwa ada perempuan berpartisipasi dalam partai dan menjadi caleg yaitu karena merasa prihatin dengan kondisi partai, ingin memajukan partai tersebut, ingin menjadi pimpinan partai dan membantu menyelesaikan konflik di dalam partai.

Caleg perempuan yang berpartisipasi dalam partai nasional memiliki alasan yang berbeda jika dibandingkan dengan caleg perempuan yang berpartisipasi dalam partai lokal. Hal ini dapat terlihat dalam penelitian Gratton (2011) terhadap sejumlah caleg perempuan di partai nasional yang menyatakan bahwa ada beberapa alasan caleg perempuan terlibat dalam pemilu legislatif seperti karena dipercayakan oleh partai dan merasa tertantang untuk bisa menjadi anggota legislatif. Sementara itu caleg perempuan yang berpartisipasi di partai lokal juga memiliki alasan yang berbeda seperti menambah pengalaman, menambah teman, merasa dekat dengan tokoh atau pimpinan partai, meyakini partai lokal lebih memahami masyarakat Aceh dan membantu masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya (Komunikasi personal, 12 Juni 2013).

Selain dapat dipengaruhi oleh bentuk partai, menurut McClelland ada tiga kebutuhan yang dapat mempengaruhi motivasi individu yaitu *need for power*, *need for affiliation* dan *need for achievement*. Apabila salah satu *need* lebih dominan dibandingkan dengan *need* lainnya pada seorang caleg perempuan, maka akan memunculkan perilaku yang berbeda-beda. Caleg perempuan dengan *need power* yang dominan memiliki karakteristik seperti cenderung mengendalikan situasi di dalam partai, kemudian memiliki ambisi yang kuat untuk membuat partai mencapai visi dan misinya. Caleg perempuan dengan *need for affiliation* yang dominan akan cenderung memilih partai yang memiliki program-program pro-rakyat atau memilih partai tersebut karena merasa memiliki ikatan yang kuat dengan tokoh atau pimpinan partai. Caleg perempuan dengan *need for achievement* yang dominan akan cenderung memilih partai yang dapat membuat individu tersebut lebih menonjol dari orang lain (Peterson, 2009).

Berdasarkan pemaparan di atas diketahui bahwa tiap individu memiliki alasan yang berbeda-beda untuk menjadi caleg. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Perbedaan

## Motivasi Pada Caleg Perempuan Di Banda Aceh Ditinjau Dari Partai Politik”

### **Motivasi**

McClelland (dalam Rangga, 2007) mengatakan bahwa motivasi merupakan energi yang tersedia yang akan dilepaskan dan dikembangkan tergantung pada kekuatan/dorongan dari kebutuhan individu dan situasi serta peluang yang tersedia. Menurut McClelland ada tiga bentuk motivasi yaitu *need for power*, *need for affiliation* dan *need for achievement*. *Need for power* merupakan suatu kebutuhan untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain sehingga orang tersebut mengikuti apa yang diperintahkan tanpa ada paksaan. *Need for affiliation* merupakan suatu kebutuhan untuk mengembangkan dan memelihara hubungan interpersonal dengan orang lain. *Need for achievement* merupakan suatu kebutuhan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

### **Calon Legislatif Perempuan**

Calon legislatif perempuan adalah anggota partai politik perempuan yang diajukan oleh partai untuk mengikuti pemilu legislatif sebagai perwakilan dari partai (Djafar, 2008).

### **Partai Politik**

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Ada dua bentuk partai yaitu partai nasional dan partai lokal. Partai nasional adalah organisasi bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan UU no. 2 tahun 2008, sedangkan partai lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan, anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) / Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota (DPRK), Gubernur dan wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil

Bupati / Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan UU no 20 tahun 2007

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 69 caleg di Banda Aceh. Kriteria responden penelitian adalah perempuan, terdaftar sebagai calon legislatif (caleg) DPRK untuk pemilu 2014, berasal dari partai yang belum atau pernah berpartisipasi satu kali dalam pemilu dan bersedia menjadi responden dalam penelitian.

### *Metode Pengambilan Data*

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan menggunakan metode penskalaan model Likert yang telah dimodifikasi, yaitu Skala Motivasi terdiri dari 24 pernyataan yang disusun sendiri oleh peneliti. Pernyataan dalam skala bersifat *favourable* dan *unfavourable* dengan 4 alternatif jawaban yang terdiri dari sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), sangat tidak sesuai (STS). Pemberian skor untuk pernyataan *favourable* bergerak dari 4 hingga 1. Untuk skor pernyataan *unfavourable* bergerak dari 1 sampai 4.

### *Metode Analisis Data*

Analisis data yang digunakan untuk melihat perbedaan motivasi pada caleg perempuan adalah dengan menggunakan program *Statistical Package For Social Science* (SPSS) versi 16, adapun teknik analisa data dalam penelitian ini adalah menggunakan korelasi *Independent sample T-test*.

## **HASIL PENELITIAN**

### *Deskripsi Data Penelitian*

Gambaran umum mengenai data penelitian secara singkat dapat dilihat pada tabel deskripsi data penelitian dibawah ini

Tabel 1. Deskripsi Hasil Data Penelitian

Variabel	Data Hipotetik				Data Empirik			
	Xmaks	Xmin	Mean	SD	Xmaks	Xmin	Mean	SD
Partai Nasional	96	24	60	12	94	60	76,26	7,46
Partai Lokal	96	24	60	12	93	48	81,21	9,8

Berdasarkan hasil statistik data penelitian, analisis deskriptif secara hipotetik skala motivasi menunjukkan bahwa jawaban minimal adalah 24, maksimal 96, nilai rerata 60 dan simpangan baku 12. Analisis deskriptif secara empirik skala motivasi pada partai nasional menunjukkan jawaban minimal adalah 60, maksimal 94, nilai rerata 76,26 dan simpangan baku 7,46. Sementara data empirik skala motivasi pada partai lokal menunjukkan jawaban minimal 48, maksimal 93, nilai rerata 76,26 dan simpangan baku 9,8.

Deskripsi hasil data penelitian tersebut dapat dijadikan batasan dalam pengkategorian sampel penelitian yang terdiri dari dua kategori yaitu tinggi dan rendah. Pembagian kategori sampel menggunakan metode signifikansi perbedaan. Metode ini menggunakan pengujian signifikansi perbedaan antara *mean* skor empirik (M) dan *mean* skor hipotetik ( $\mu$ ) (Azwar, 2011).

Tabel 2. Kategorisasi motivasi pada partai nasional

Skor	Kategori	Jumlah	Persentase
$X < 53$	Rendah	0	0%
$67 \leq X$	Tinggi	34	100%

Berdasarkan tabel 10 diatas dari 34 calon legislatif perempuan di partai nasional memiliki motivasi yang tinggi dengan persentase sebesar 100 % .

Tabel 3. Kategorisasi motivasi pada partai lokal

Skor	Kategori	Jumlah	Persentase
$X < 53$	Rendah	1	3%
$67 \leq X$	Tinggi	33	97%

Berdasarkan tabel di atas dari 34 calon legislatif perempuan di partai lokal diketahui bahwa sebanyak 1 orang dengan persentase 3% memiliki motivasi rendah, dan sebanyak 33 orang dengan persentase 97 % memiliki motivasi yang tinggi.

#### *Analisis Data Penelitian*

##### a. Uji normalitas

Berdasarkan uji normalitas yang dilakukan pada 68 responden penelitian pada kelompok partai nasional memiliki sebaran normal (K-S-Z = 0,80, dengan  $p > 0,05$ ) dan pada kelompok partai lokal juga memiliki sebaran normal (K-S-Z = 0,13, dengan  $p > 0,05$ ).

##### b. Uji Homogenitas

Uji Homogenitas ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 16, yaitu *compare mean*, dari hasil uji homogenitas ini diperoleh bahwa nilai signifikansi sebesar 0,22 ( $p > 0,05$ ). Hasil tersebut menunjukkan data kelompok Partai Nasional dan Partai Lokal mempunyai varian yang sama.

##### c. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian menggunakan teknik *independent samples t test* dan diperoleh nilai signifikansi  $p = 0,023$  ( $0,023 < 0,05$ ) maka berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan motivasi pada caleg perempuan partai nasional dengan caleg perempuan partai lokal.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan motivasi pada caleg perempuan di partai nasional dan caleg perempuan di partai lokal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi pada uji T yaitu 0,023 ( $p < 0,05$ ), oleh karena itu hipotesis yang diajukan dalam penelitian terbukti bahwa ada perbedaan motivasi caleg perempuan ditinjau dari bentuk partai dapat diterima.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, caleg perempuan di partai nasional memiliki motivasi yang tinggi dengan persentase 100% dan caleg perempuan di partai lokal juga memiliki motivasi yang tinggi dengan persentase 97%. Meskipun terdapat selisih angka sebesar 3% , namun motivasi caleg perempuan pada kedua bentuk partai masih tergolong dalam kategori tinggi. Hal ini tentu tidak sejalan dengan beberapa penelitian yang mengungkapkan bahwa perempuan tidak ingin berpartisipasi dalam politik dikarenakan motivasi yang rendah, seperti dalam penelitian Idris (2010) mengenai minat perempuan Minangkabau pada politik.

Menurut Idris (2010) motivasi yang tinggi menjadi salah satu indikator yang menandakan bahwa perempuan mulai menyadari pentingnya keberadaan mereka di dalam lembaga politik untuk menyuarkan hak-hak perempuan. Rafni (2008) mengungkapkan perempuan yang terlibat di lembaga legislatif memiliki motivasi yang tinggi disebabkan oleh keinginan mereka untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan partai dan masyarakat umum. Menurut Sari (2009) partisipasi perempuan di legislatif nasional maupun lokal sangat penting karena perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami paling baik oleh perempuan sendiri.

Menurut Santrock (2008), ada dua faktor yang menyebabkan motivasi individu berbeda-beda yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari individu itu sendiri, misalnya seorang caleg perempuan di partai nasional termotivasi karena merasa prihatin dengan kondisi partai (Wahidah, 2009). Beberapa caleg perempuan di partai lokal memilih berpartisipasi dalam partai lokal dikarenakan kedekatan mereka dengan figur pemimpin partai, sementara caleg perempuan di partai nasional memilih berpartisipasi dalam partai nasional dikarenakan peluang mereka untuk aktif di legislatif pusat lebih besar (Komunikasi personal, 27 Januari 2014). Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar individu itu sendiri, seperti ideologi partai, visi dan misi partai, program-program partai dan bentuk partai (partai nasional atau partai lokal).

Selain itu motivasi yang tinggi juga dapat dipengaruhi oleh budaya Aceh. Jika ditinjau dari sejarah, Aceh memiliki nama-nama perempuan yang memiliki jiwa heroik yang tinggi dan perempuan-perempuan yang aktif dalam bidang pemerintahan serta pernah memimpin Aceh menjadi bangsa yang dikenal dunia, seperti Cut Nyak Dhien, Laksamana

Malahayati, Ratu Safiatuddin, Nur Al Alam Nagiyhat Ad-Din Syah, dan lainnya (Siregar, 2012).

*Need for power* merupakan suatu kebutuhan untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain sehingga orang tersebut mengikuti apa yang diperintahkan tanpa ada paksaan. Berdasarkan analisis deskriptif bentuk motivasi, partai lokal memiliki *need for power* yang tinggi yaitu sebesar 97% sedangkan partai nasional memiliki *need for power* sebesar 94% sehingga dapat disimpulkan bahwa caleg perempuan di partai lokal memiliki *need for power* yang lebih dominan dibandingkan dengan caleg perempuan di partai nasional.

Tingginya *need for power* pada caleg perempuan di partai lokal dapat disebabkan oleh asal usul pengurus partai lokal yang merupakan tokoh dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang sangat memiliki pengaruh dengan masyarakat Aceh (Jafar, 2009), memiliki kemampuan mobilisasi jaringan mantan anggota GAM lainnya sehingga dengan kemampuan tersebut membuat salah satu partai lokal menang dalam periode pemilu sebelumnya (Idris, 2009). Selain itu jika dilihat dari sejarah politik Aceh, Aceh merupakan suatu bangsa yang memiliki pengaruh atas sebagian wilayah nusantara dan peperangan yang dilakukan oleh rakyat Aceh merupakan peperangan untuk memertahankan kedaulatan negara, bangsa dan agamanya. Nilai historis ini sangat memengaruhi persepsi, sikap, dan orientasi politik rakyat Aceh dalam hubungan kekuasaan dan hubungan dengan struktur kekuasaan di luar Aceh (Djafar, 2008).

*Need for affiliation* merupakan suatu kebutuhan untuk mengembangkan dan memelihara hubungan interpersonal dengan orang lain. Berdasarkan analisis deskriptif bentuk motivasi, partai lokal memiliki *need for affiliation* yang tinggi yaitu sebesar 100%, sementara caleg perempuan di partai nasional memiliki *need for affiliation* sebesar 97% sehingga dapat disimpulkan bahwa caleg perempuan di partai lokal memiliki *need for affiliation* yang lebih dominan dibandingkan dengan caleg perempuan di partai nasional.

Tingginya *need for affiliation* pada caleg perempuan di partai lokal dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti, keberadaan partai lokal itu sendiri yang dianggap lebih memahami aspirasi masyarakat lokal dan mampu menyerap aspirasi masyarakat di daerah secara lebih tepat (Astari, 2012). Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada sebagian perempuan yang terdaftar sebagai caleg yang berasal dari partai lokal, terdapat beberapa alasan

mengapa caleg tersebut memilih untuk bergabung partai lokal dikarenakan partai lokal lebih mengerti kondisi masyarakat Aceh, program-program partai lokal lebih memihak rakyat Aceh.

*Need for achievement* merupakan suatu kebutuhan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan analisis deskriptif bentuk motivasi, caleg perempuan di partai lokal memiliki *need for achievement* yang tinggi yaitu sebesar 94% sedangkan caleg perempuan di partai nasional memiliki *need for achievement* sebesar 97% sehingga dapat disimpulkan bahwa caleg perempuan di partai lokal memiliki *need for achievement* yang lebih rendah dibandingkan dengan caleg perempuan di partai nasional.

Rendahnya *need for achievement* pada caleg perempuan di partai lokal dapat disebabkan oleh ruang lingkup partai lokal yang hanya berada di wilayah lokal saja dan hanya menyerap aspirasi masyarakat lokal (Jafar, 2009), sedangkan partai nasional yang merupakan partai politik yang terdapat di seluruh Indonesia dan berpartisipasi dalam partai tersebut tentu akan membuka peluang bagi calon legislatif perempuan untuk menjadi anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI (Widyawati, 2011). *Need for achievement* yang rendah pada caleg perempuan di partai lokal juga dapat dipengaruhi oleh konflik yang berkepanjangan di Aceh. Sehingga setelah konflik berakhir, perempuan Aceh lebih memfokuskan perjuangannya pada kesejahteraan ekonomi (Siregar, 2012).

Pengalaman kerja dan jenjang pendidikan yang diperoleh caleg perempuan dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan *Need for achievement* yang rendah pada caleg perempuan di partai lokal. Jika dilihat dari karakteristik sampel, caleg perempuan di partai nasional memiliki pengalaman kerja di partai lebih lama dibandingkan dengan caleg perempuan di partai lokal. Menurut Sari (2009) pengalaman politik mempengaruhi persepsi caleg mengenai peranan perempuan di legislatif. Individu yang memiliki pengalaman di politik lebih lama tentu akan beranggapan bahwa keberadaan perempuan di legislatif itu penting sehingga ia akan berusaha untuk menjadi anggota legislatif. Jika ditinjau dari jenjang pendidikan, caleg perempuan di partai nasional memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari caleg perempuan di partai lokal. Menurut Winkel (dalam Sari, 2009) semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang akan semakin baik kerangka berfikirnya sehingga akan menolong seseorang dalam mentransformasikan serta menentukan keputusan suatu pandangan terhadap nilai-nilai baru yang akan

diterimanya, misalnya pemilihan partai yang tepat, strategi berkampanye, dan lainnya.

Faktor lainnya yang dapat menjadi penyebab *need for achievement* pada caleg perempuan di partai lokal tidak dominan adalah identitas politik yang dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat (Djafar, 2008). Islam mengajarkan setiap pemeluknya untuk selalu berserah diri apabila telah berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan yang diinginkan. Ketika hal tersebut berhasil diraih atau didapatkan maka itu menjadi takdir yang digariskan oleh Tuhan kepada individu tersebut. Keyakinan ini tentu diyakini juga oleh caleg perempuan di partai lokal sehingga hal tersebut memiliki dampak pada persentase *need for achievement* di partai lokal.

Berbeda dengan caleg perempuan yang berada di partai lokal, caleg perempuan di partai nasional memiliki *need for achievement* yang dominan. Caleg perempuan di partai nasional memiliki *need for achievement* yang lebih dominan disebabkan oleh tuntutan partai yang mengharuskan setiap anggotanya yang ingin dicalonkan pada pemilu harus memiliki prestasi yang lebih baik. Selain itu penentuan nomor urut pemilihan juga ditentukan berdasarkan keaktifan dan prestasi masing-masing caleg (Jafar, 2009). Sehingga kondisi lingkungan di dalam partai nasional yang menjadi faktor tingginya persentase *need for achievement* pada caleg perempuan di partai nasional.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan motivasi yang signifikan pada caleg perempuan di partai nasional dengan caleg perempuan di partai lokal. Berdasarkan kategorisasi bentuk motivasi, *need for power* dan *need for affiliation* calon legislatif perempuan di partai lokal lebih tinggi dibandingkan dengan partai nasional, akan tetapi *need for achievement* calon legislatif partai lokal lebih rendah dibandingkan dengan calon legislatif perempuan di partai nasional.

## DAFTAR PUSTAKA.

- Azwar, S. (2011). *Penyusunan Skala Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asriati, M. (2009). *Konstruksi Realitas Para Calon Legislator pada Partai Politik Lokal di Aceh*. Skripsi. Medan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Sumatera Utara.
- Astari, D. (2012). *Urgensi Partai Lokal dalam Demokrasi*. di akses pada tanggal 24 September 2013 dari <http://politik.kompasiana.com/2012/04/16/urgensi-partai-lokal-dalam-demokrasi-455492.html>.
- Djafar, M.TB. (2008). *Pilkada dan Demokrasi Konsosiasional di Aceh. Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*. 04, 01, 195-217
- Gratton, K. (2011). *Pendapat Perempuan tentang Perempuan dalam Dunia Politik Pada Era Reformasi dan Masa Depan di Kota Malang*. Skripsi. Malang. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hedberg, T. (2002). *Motivation - Three Perspectives on Motivation*. Termpaper. Oslo: Oslo University College.
- Idris, A. (2009). *Partai Politik Lokal di Indonesia: Sebuah Uji Coba di Aceh*. Australia : Crawford School of Economics and Government.
- Idris, N. (2010). *Minat Perempuan Minangkabau pada Politik Masih Rendah*. *Jurnal Sosial Politik*. 02, 381-390.
- Ismail, M. (2009). *Legislatif perempuan pasca pemilihan umum 2009 (tantangan dan peluang di aceh)*. Bahan diskusi pada Workshop "Legislatif Perempuan dan Jaringan Perempuan di Aceh", dilaksanakan oleh MISPI bekerjasama dengan the Asia Foundation.
- Jafar, M. (2009). *Perkembangan dan Prospek Partai Politik Lokal di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Tesis. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Koeswara, H. (2009). *Partisipasi Politik Kader Perempuan Parpol (Studi tentang Kendala Partisipasi Politik Kader Perempuan dalam Kegiatan Parpol pada Pelaksanaan Pilkada di Provinsi Jambi)*. (Laporan Ilmu Sosial)

- McClelland. (1987). *Human Motivation*. Australia: Press Syndicate the University of Cambridge
- Pambundi, M.Y. (2007). Perempuan dan Politik Studi tentang aksesibilitas Perempuan Menjadi Anggota Legislatif di Kabupaten Sampang. *Skripsi*. Surabaya : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Airlangga.
- Peterson, D. T. (2009). the Influence of McClelland's Need Types on Recall, Comprehension, and Course Satisfaction in A New Employee Orientation Course for Nurses. Dissertation. United States: University South Alabama.
- Rangga, M. (2007). Pengaruh Motivasi Diri terhadap Kinerja Belajar Mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa Universitas Paramadina). 07,07.
- Santrock, J. W. (2008). *Psikologi Pendidikan*, Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sari, A. (2009). Perempuan dan Politik di Kota Bekasi (Telaah Perspektif Komunikasi Gender dalam Politik). *Jurnal Paradigma*, 02, 173-184.
- Sari, A. (2010). Persepsi Masyarakat Terhadap Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan di Legislatif.
- Silalahi, J. (2008). Pengaruh Iklim Kelas terhadap Motivasi Belajar. *Jurnal Pembelajaran*, 30.
- Wahidah. (2009). Perjuangan dan Peran Perempuan di DPRD Jawa Timur 2004 - 2009. Artikel Politik.
- Widayati. (2011). Pembubaran Partai dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum*. 26.612-639